



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KECAMATAN NGADIREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Semangat reformasi sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, akan tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, propinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang **disusun** dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan **disampaikan** tepat waktu.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, khususnya di Kantor Kecamatan Ngadirejo terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Keuangan adalah guna memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016;

BAB II

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk OPD Kantor Kecamatan Ngadirejo bukan merupakan OPD yang memiliki kegiatan memungut/ pendapatan, seluruh anggaran yang diterima merupakan bersumber dari Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dan dari APBN, sehingga tidak ada rekening realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat kami sampaikan.

BELANJA

Realisasi APBD Tahun 2018 bagi Kecamatan Ngadirejo sesuai Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2018 Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi APBD Tahun 2018
Kantor Kecamatan Ngadirejo

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	% realisasi
I. Belanja Tidak Langsung			
a. Belanja Pegawai	2.436.878.111,00	2.385.820.827,00	97.90
II. Belanja Langsung	419.972.320,00	415.532.601,00	98.94
a. Belanja Pegawai	119.907.000,00	119.906.250,00	99.99
b. Belanja Barang dan Jasa	273.065.320,00	268.626.351,00	98.37
c. Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	100.00
Jumlah	2.856.850.431,00	2.801.353.428,00	98.06

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018 Kantor Kecamatan Ngadirejo, untuk belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.385.820.827,00 atau 97.90 % dari anggaran sebesar Rp. 2.436.878.111,00. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kami dalam merencanakan penghitungan gaji seperti, adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji pokok yang tidak bisa diprediksi, maupun adanya pegawai

yang pensiun sehingga menyebabkan realisasi anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan target anggaran.

Untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 415.532.601,00 dari anggaran sebesar Rp. 419.972.320,00 Sehingga terdapat prosentase penggunaan dana yang terealisasi sebesar 98.94 % dari anggaran yang disediakan.

a. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Pada tahun 2018 kantor kecamatan ngadirejo mendapatkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 419.972.320,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 415.532.601,00 atau (98.94 %), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. - 4.439.719,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal kantor kecamatan ngadirejo meliputi Belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor seperti yang tertuang ditabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Belanja Modal Kantor Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2018

Belanja Modal	2018	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja modal Lemari Arsip	3.500.000	
Belanja modal Filing Kabinet	2.000.000	
Belanja modal Kursi Rapat	4.000.000	
Belanja modal Podium/Mimbar	3.000.000	
Belanja modal Pengadaan Rak Buku	3.000.000	
Belanja modal pengadaan Laptop	6.000.000	
Belanja modal Pengadaan Printer	4.000.000	
Belanja modal pengadaan Papan Data	950.000	
Belanja modal pengadaan Papan Data	550.000	
JUMLAH	27.000.000	

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp. 27.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 27.000.000,00

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	2017	2018
	Rp	Rp
a. Kas di Kas Daerah		
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
c. Kas di Bendahara Penerimaan		
d. Investasi Jangka Pendek		
Jumlah Kas dan Setara Kas	0	0

a. Kas di Kas Daerah

-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp 0.00**, karena sisa anggaran yang tidak terserap sudah disetorkan pada tanggal 31 Desember 2018. dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa UP/GU/TU:	2018	2017
	Rp	Rp
1) Sisa GU	49.497	2.583.988
2) Sisa TU	2.140.751	15.215.996
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	2.190.248	17.799.984

c. Kas di Bendahara Penerimaan

-

2. Piutang

-

3. Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis kecamatan ngadirejo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.663.000 dengan rincian sebagai berikut :

SISA BARANG				KETERANGAN
JML	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
4	HVS 70 gr	50.000	200.000	
3	Odner	20.000	60.000	
2	Amplop Tanggung	18.000	36.000	
17	Stopmap Kertas	1.500	25.500	
22	Snelhecter Kertas	1.500	33.000	
3	Snelhecter Plastik	10.000	30.000	
3	Clip	7.000	21.000	
1	Buku Folio	18.000	18.000	
1	Spidol White Board isi 12	98.000	98.000	
1	Steples Besar	30.000	30.000	
3	Isi Steples Kecil	2.500	7.500	
3	Isi Steples Besar	3.000	9.000	
1	Lem Cair Tanggung	5.000	5.000	
20	Materai 3000	3.000	60.000	
150	Amplop Dinas Panjang	500	75.000	
180	Lembar Disposisi	500	90.000	
45	Kartu Kendali Masuk	12.000	540.000	
36	Kartu Kendali Keluar	12.000	432.000	
4	Kwitansi Dinas	49.000	196.000	
5	Plat IMB	50.000	250.000	

SISA BARANG				KETERANGAN
JML	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
2	Pengharum Ruangan	17.500	35.000	
2	Sikat Kamar Mandi	12.500	25.000	
1	Tongkal Besar	130.000	130.000	
1	Keset Kecil	35.000	35.000	
1	Kain Lap	15.000	15.000	
1	Canebo	65.000	65.000	
1	Gayung	14.000	14.000	
3	Sabun Cuci Piring	15.000	45.000	
1	Engkrak Bambu	13.000	13.000	
1	Tornado Philips 5 Watt	25.000	25.000	
1	Tornado Philips 10 Watt	30.000	30.000	
1	Stop Kontak 4 Lubang	15.000	15.000	
	JUMLAH		2.663.000	

4. Investasi Jangka Panjang

-

5. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2018 dan 2017, tersaji sebagai berikut :

Aset tetap :	2018	2017
	Rp	Rp
a. Tanah	461.453.230	461.453.230
b. Peralatan dan Mesin	1.141.232.875	1.114.232.875
c. Gedung dan Bangunan	949.659.000	949.659.000
d. Jalan, jaringan dan instalasi	1.712.600	1.712.600
e. Aset Tetap Lainnya	3.066.500	3.066.500
f. Akumulasi Penyusutan	(937.050.286,43)	(937.050.286,43)
g. Aset Lainnya	26.450.000	26.450.000
Jumlah Aset Tetap	1.622.736.918,57	1.593.476.419

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam TA 2018 penambahan belanja modal sebesar Rp 27.000.000,00. Jumlah aset tetap per tanggal 31 Desember 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2018

Aktiva Tetap	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
a. Tanah	461.453.230	0		461.453.230
b. Peralatan dan Mesin	1.114.232.875	27.000.000	0	1.141.232.875
c. Gedung Bangunan	949.659.000	0	0	949.659.000
d. Jalan, jaringan dan instalasi	1.712.600	0	0	1.712.600

e. Aset Tetap Lainnya	3.066.500	0	0	3.066.500
f. Akumulasi Penyusutan	(937.050.286,43)			(937.050.286,43)
g. Aset Lainnya	26.450.000			26.450.000
Jumlah	1.593.476.418,57	27.000.000		1.622.736.918,57

Saldo akhir Aset Tetap TA 2018 sebesar Rp 1.622.736.918,57 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA 2017 (Neraca Awal) sampai dengan TA 2018, sehingga atas penyajian Saldo Aset Tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja modal yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, penghapusan maupun koreksi hasil audit. Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tidak ada mutasi aset Tanah pada tahun 2018 ini. Masih sama seperti tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 461.453.230,00

b. Peralatan dan Mesin

Penilaian atas AT-Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal, didasarkan pada Nilai Perolehan/ Pembelian. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 1.114.232.875 dan Rp 1.141.232.875

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.114.232.875 termasuk aset tahun 2017 ditambah penambahan mutasi Tahun Anggaran 2018 berupa Belanja modal tahun anggaran 2018.

c. Gedung dan Bangunan

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset jalan ,Irigasi dan Jaringan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal.. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 949.659.000.,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset jalan ,Irigasi dan Jaringan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 dan 2017 tidak ada perubahan.

e. Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 3.066.500,- dan Rp 3.066.500,-

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan (A.P) merupakan Penyusutan dari masing aset tetap, berdasarkan ini akuntansi dan standart penyusutan.

Nilai A.P per 31 Desember 2018 sebesar (937.050.286,43)

g. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset rusak yang belum atau sedang proses penghapusan. Jumlah aset lainnya per 31 desember 2018 sebesar Rp. 26.450.000,00

6. Dana Cadangan

-

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek itu merupakan Utang Belanja Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) bulan desember 2018 yang belum dibayarkan per 31 desember 2018 sebesar Rp. 47.877.600, serta utang belanja jasa kantor yang telah dipakai pada bulan Desember 2018, tetapi baru bisa dibayarkan pada tahun 2019, sebesar Rp. 1.095.854. sehingga total kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 48.973.454.

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Saldo per 31 Desember 2017 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana :	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
1. Ekuitas Dana Lancar (EDL)	402.500	2.663.000
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI)	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57
3. Ekuitas Dana Cadangan (EDC)		
Jumlah ekuitas dana	<u>1.593.476.418,57</u>	<u>1.622.736.918,57</u>

Saldo-saldo akun Ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Ekuitas Dana Lancar (EDL)*

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2018
Ekuitas Dana Lancar (EDL) :	Rp	Rp
a). SILPA	0	0
b). Pajak yang belum disetor..		
c). Persediaan	402.500	2.663.000
Jumlah EDL	402.500	2.663.000

Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2017 dan 2018 sebesar Rp 402.500 dan Rp 2.663.000 dapat dijelaskan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Aktiva Lancar:	2017	2018
	Rp	Rp
a. Kas di Kas Daerah		
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
d. Piutang Pajak	0,00	0,00
e. Piutang Lain – lain	0,00	0,00
f. Bagian Lancar TP-TGR	0,00	0,00
g. Persediaan	402.500	2.663.000
Jumlah	402.500	2.663.000

Dikurangi:

Hutang Jangka Pendek:	2017	2018
	Rp	Rp
a. Utang PFK	0	0
b. Utang Jangka Pendek lainnya	50.761.233,00.	48.973.454.00.
Jumlah	0,00	0
EDL	50.761.233,00	48.973.454,00

2. *Ekuitas Dana Investasi (EDI)*

Saldo akun ini merupakan kekayaan yang berasal dari selisih investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Investasi (EDI) :	2017	2018
	Rp	Rp
a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0,00	0,00
b. Diinvestasikan dlm aset tetap	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57
c. Diinvestasikan dalam aset lainnya	0,00	0,00
d. Dana yg harus disediakan utk pembayaran htg jgk panjang	0,00	0,00
Jumlah EDI	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2017 dan 2018 sebesar Rp 1.593.073.918,57 dan Rp 1.620.073.918,57 dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut :

Investasi dan Aset :	2017	2018
	Rp	Rp
a. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
b. Aset Tetap	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57
c. Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57

Dikurangi:

Kewajiban Jangka Panjang:	2017	2018
	Rp	Rp
Hutang Dalam Negeri- PP	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
EDI	1.593.073.918,57	1.620.073.918,57

3. Ekuitas Dana Dicadangkan (EDC)

-

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan penjelasan penggunaan anggaran tahun 2017 Terhadap beban operasi yang dilaksanakan.

Beban operasi pada TA. 2017 sebesar Rp. 2.626.250.836 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Operasi:	2018
	Rp 2.770.305.149
a. Beban Pegawai	2.504.057.477
b. Beban Barang dan Jasa	266.247.672
SURPLUS DEFISIT	(2.770.305.149)

Jadi Beban Operasi TA. 2018 sebesar Rp. 2.770.305.149 merupakan gabungan dari Beban pegawai, beban barang dan jasa. Yang kesemuanya itu merupakan transfer dari Pemkab. Temanggung. Bukan dari hasil pendapatan OPD, karena OPD Kec. Ngadirejo bukan merupakan OPD yang memperoleh pendapatan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas TA. 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Ekuitas Awal	1.542.715.185,57
b. Surplus/Defisit LO	(2.770.305.149,00)
c. Koreksi Kesalahan. Perubahan Kebijakan Akuntansi	0
d. Ekuitas Untuk di konsolidasikan	2.801.353.428,00
Jumlah EDI	1.573.763.464,57

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 1.542.715.185,57, selama TA. 2018 terdapat perubahan Beban operasi sebesar Rp. (2.770.305.149,00), sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan menjadi sebesar Rp. 2.801.353.428,00

Ekuitas akhirnya menjadi sebesar Rp. **1.573.763.464,57**

BAB III

P E N U T U P

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: **partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme.**

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan Sumber daya manusia dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

10 Januari 2019
CAMAT NGADIREJO

SERI SUHARSA, SH.
NIP. 19660418 199803 1 005